



Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Aspek Ketepatan Dan Kebermanfaatan Program Di Desa Paringgonan Kabupaten Padang Lawas

Jernih Hati Hsb dan Sholeh Fikri

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: jernihhatihsb@gmail.com, sholehfikri@uinsyahada.ac.id

Keywords	Abstract
Community Welfare, Effectiveness, Family Hope Program, targeting accuracy, Paringgonan Village	This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Paringgonan Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency, focusing on targeting accuracy and program benefits. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observations, interviews, and documentation and analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Family Hope Program has not yet achieved optimal effectiveness. In terms of targeting accuracy, several eligible households had not been included as beneficiaries, while some households whose economic conditions had improved were still receiving assistance. Regarding program benefits, the Family Hope Program has positively contributed to meeting beneficiaries' educational, healthcare, and basic household needs. However, the assistance has not been sufficient to promote long-term economic independence, as it is primarily used to fulfill daily consumption needs. Therefore, regular updates of beneficiary data, stronger coordination among stakeholders, and the integration of the Family Hope Program with community economic empowerment initiatives are necessary to improve the overall effectiveness of the program.

	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan fokus pada aspek ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan belum sepenuhnya optimal. Pada aspek ketepatan sasaran masih ditemukan keluarga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara beberapa keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik masih menerima bantuan. Pada aspek kebermanfaatan, Program Keluarga Harapan telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Namun, bantuan tersebut belum mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara optimal karena masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi Program Keluarga Harapan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar efektivitas program dapat ditingkatkan.
Article Info	
Submit: 15/05/2026	Accepted: 22/06/2026 Publish: 25/06/2026
Corresponding Author: Jernih Hati Hsb jernihhatihsb@gmail.com	

Introduction

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut menjadikan kemiskinan sebagai tantangan utama dalam pembangunan nasional sehingga diperlukan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Maharani et al., 2024). Kemiskinan juga dipandang sebagai bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial yang memadai sehingga menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat (Dianto, 2016; Fikri et al., 2020).

Dalam perspektif Islam, perhatian terhadap masyarakat yang lemah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 memberikan pesan agar setiap generasi memperhatikan kesejahteraan keturunannya sehingga tidak meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi maupun sosial (Departemen Agama RI, 2020). Nilai tersebut menjadi landasan moral bahwa negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama (Al-Mahalli & As-Suyuthi, t.t.).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan sebagai program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses terhadap

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Natsir et al., 2025). Melalui bantuan tunai bersyarat, PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.

Meskipun demikian, keberhasilan suatu program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Dalam implementasinya, berbagai persoalan masih sering ditemukan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, ketidaksesuaian data penerima, serta belum optimalnya manfaat program yang dirasakan masyarakat (Putu Dewi et al., 2023). Oleh karena itu, evaluasi efektivitas menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin.

Evaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan umumnya dapat dilakukan melalui beberapa indikator, namun aspek ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program merupakan dua indikator yang paling menentukan keberhasilan implementasi PKH. Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian antara penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Ketidaktepatan sasaran berpotensi menyebabkan keluarga yang layak tidak memperoleh bantuan, sedangkan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria masih tetap menerima manfaat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat (Zakirin & Arifin, 2022; Nunung & Sulastri, 2025).

Selain ketepatan sasaran, kebermanfaatan program juga menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas PKH. Kebermanfaatan tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program yang efektif diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Ramdani & Purnamasari, 2019).

Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2007. Berdasarkan data desa, dari 811 kepala keluarga terdapat 250 keluarga yang tergolong kurang mampu, sedangkan keluarga yang menerima PKH sebanyak 184 keluarga. Masih terdapat keluarga yang memenuhi kriteria penerima tetapi belum memperoleh bantuan, sementara beberapa penerima manfaat diketahui telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi namun masih tercatat sebagai penerima PKH. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan dalam aspek ketepatan sasaran sekaligus menjadi indikasi perlunya evaluasi terhadap kebermanfaatan program (Dokumen Desa Paringgonan, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan berdasarkan dua indikator utama, yaitu ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program pada tingkat desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan perlindungan sosial serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program bagi masyarakat penerima manfaat. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan program berdasarkan pengalaman, persepsi, dan informasi yang disampaikan oleh para informan (Sugiyono, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 dan masih ditemukan berbagai persoalan terkait ketepatan sasaran penerima manfaat serta kebermanfaatan program bagi masyarakat.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Paringgonan, Sekretaris Desa, pendamping Program Keluarga Harapan, keluarga penerima manfaat (KPM), serta masyarakat yang memenuhi kriteria penerima tetapi belum memperoleh bantuan. Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh data yang komprehensif mengenai implementasi PKH dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai ketepatan sasaran dan manfaat program yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen desa, data penerima PKH, arsip, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2023).

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi (Moleong, 2021).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan ditinjau dari aspek ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program (Miles et al., 2014).

Result and Analysis

Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan

Ketepatan sasaran merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas suatu program bantuan sosial. Suatu program dikatakan tepat sasaran apabila bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah (Kementerian Sosial RI, 2021). Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), ketepatan sasaran menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan tujuan program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan belum sepenuhnya memenuhi aspek ketepatan sasaran. Berdasarkan data desa terdapat 811 kepala keluarga, dengan 250 kepala keluarga tergolong kurang mampu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 keluarga telah menjadi penerima Program Keluarga Harapan, sedangkan masih terdapat 66 keluarga yang belum menerima bantuan. Dari 66 keluarga tersebut, sebanyak 20 keluarga dinilai layak menerima PKH berdasarkan kondisi ekonomi dan pemenuhan kriteria program, namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, ditemukan pula beberapa keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik tetapi masih tetap menerima bantuan PKH. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses penetapan penerima manfaat masih menghadapi kendala dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketergantungan terhadap data administrasi menyebabkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak dapat segera diakomodasi dalam proses penetapan penerima bantuan. Akibatnya, terdapat masyarakat yang layak memperoleh bantuan belum masuk dalam daftar penerima, sedangkan sebagian penerima yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan masih tetap memperoleh bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa validitas data menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi PKH (Kementerian Sosial RI, 2021).

Berdasarkan perspektif evaluasi kebijakan publik, ketepatan sasaran merupakan bagian dari efektivitas implementasi kebijakan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan diukur dari kemampuan program dalam mencapai kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Apabila manfaat program tidak diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, maka tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH di Desa Paringgonan masih memerlukan perbaikan terutama dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat.

Selain dipengaruhi oleh kualitas data, ketepatan sasaran juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstitusi yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pendamping PKH, pemerintah desa, serta dinas sosial memiliki peran yang saling berkaitan dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan informasi mengenai perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak segera ditindaklanjuti sehingga proses pembaruan data berlangsung relatif lambat. Padahal, proses validasi data secara berkala merupakan salah satu mekanisme penting untuk menjaga akurasi penerima bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis dan Zubaidah (2020) yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama pelaksanaan PKH adalah masih ditemukannya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria, sementara masyarakat yang layak menerima justru belum memperoleh bantuan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa permasalahan validasi data menjadi penyebab utama belum optimalnya efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Riyanto (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada akurasi penetapan kelompok sasaran. Kesalahan dalam proses targeting tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut dapat dipahami bahwa aspek ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan belum terlaksana secara

optimal. Permasalahan utama bukan terletak pada mekanisme penyaluran bantuan, melainkan pada proses pembaruan data penerima manfaat yang belum mampu mengikuti dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan proses verifikasi dan validasi data secara berkala melalui sinergi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan Dinas Sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria sehingga tujuan Program Keluarga Harapan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif.

Ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya jumlah penerima manfaat, tetapi juga menyangkut kesesuaian karakteristik penerima dengan indikator kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah. Keluarga yang termasuk dalam kategori miskin seharusnya memperoleh prioritas berdasarkan hasil verifikasi kondisi sosial ekonomi secara objektif. Dalam praktiknya, perubahan kondisi ekonomi masyarakat berlangsung secara dinamis sehingga data penerima manfaat memerlukan pembaruan secara berkala. Apabila proses pembaruan data tidak dilakukan secara optimal, maka potensi terjadinya inclusion error maupun exclusion error akan semakin besar. Oleh karena itu, kualitas basis data menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai proses penetapan penerima manfaat masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Beberapa keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi belum memperoleh bantuan karena belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebaliknya, terdapat keluarga yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan tetapi masih terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan status sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya diikuti dengan proses pemutakhiran data administrasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem pendataan yang digunakan dalam menetapkan penerima manfaat (Suharto, 2021).

Ditinjau dari perspektif kebijakan publik, ketepatan sasaran merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kepada kelompok yang berhak menerimanya. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui proses pendataan yang transparan, verifikasi lapangan yang objektif, serta evaluasi berkala terhadap kondisi penerima manfaat. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan program untuk mengurangi kemiskinan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap ketepatan sasaran perlu dilakukan secara berkesinambungan agar pemerintah dapat mengetahui berbagai hambatan yang terjadi selama implementasi program. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Agustino, 2020).

Keberhasilan ketepatan sasaran juga sangat dipengaruhi oleh peran pendamping Program Keluarga Harapan dan pemerintah desa sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pendamping memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap perubahan kondisi keluarga penerima manfaat sekaligus menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada instansi terkait. Sementara itu, pemerintah desa memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat membantu proses verifikasi data penerima bantuan. Sinergi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan Dinas Sosial menjadi faktor penting dalam meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Apabila koordinasi antaraktor berjalan dengan baik, maka peluang

terjadinya kesalahan sasaran dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif (Kementerian Sosial RI, 2021).

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian dapat dipahami bahwa ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya pada aspek pemutakhiran data dan verifikasi penerima manfaat. Meskipun sebagian besar bantuan telah diterima oleh keluarga yang membutuhkan, masih terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum memperoleh haknya, serta terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya tercapai apabila ditinjau dari indikator ketepatan sasaran. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi secara periodik terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pendataan berbasis kondisi riil masyarakat agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dengan demikian, tujuan Program Keluarga Harapan sebagai instrumen perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan secara lebih optimal (Dunn, 2018; Kementerian Sosial RI, 2021).

Kebermanfaatan Program Keluarga Harapan

Kebermanfaatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu program bantuan sosial. Suatu program tidak hanya dinilai dari keberhasilannya dalam menyalurkan bantuan kepada sasaran yang tepat, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu memberikan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kebermanfaatan tercermin melalui meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bappenas (2020), program perlindungan sosial dikatakan memberikan manfaat apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebermanfaatan PKH menjadi indikator yang penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan memberikan manfaat yang cukup dirasakan oleh sebagian besar keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, membeli perlengkapan sekolah, membayar biaya transportasi, memenuhi kebutuhan kesehatan ibu hamil maupun balita, serta membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, bantuan tersebut juga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga yang memiliki pendapatan tidak tetap. Walaupun jumlah bantuan yang diterima belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, masyarakat mengakui bahwa keberadaan PKH sangat membantu dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama PKH sebagai program perlindungan sosial telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun dampaknya masih bersifat terbatas. Manfaat yang dirasakan masyarakat tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan anak dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Midgley (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial harus mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap.

Selain memberikan manfaat ekonomi, Program Keluarga Harapan juga memberikan dampak sosial terhadap keluarga penerima manfaat. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memberikan pengetahuan mengenai pola pengasuhan anak, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pentingnya pendidikan. Pengetahuan tersebut mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan bantuan secara lebih produktif. Dengan demikian, manfaat PKH tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga dari perubahan pola pikir dan perilaku keluarga penerima manfaat menuju kehidupan yang lebih mandiri. Menurut Adi (2018), pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila mampu meningkatkan kapasitas individu sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat PKH belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga bantuan PKH lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daripada sebagai modal peningkatan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial belum cukup apabila tidak diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PKH perlu diintegrasikan dengan program pengembangan usaha, pelatihan keterampilan, maupun pemberdayaan ekonomi lokal agar keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri. Pandangan tersebut sesuai dengan pemikiran Chambers (2019) yang menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan kombinasi antara bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta perubahan yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis menggunakan konsep kesejahteraan sosial, manfaat PKH telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga miskin, meskipun belum sepenuhnya mampu mengubah status ekonomi mereka. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan keberfungsian sosial. Dalam penelitian ini, keluarga penerima manfaat merasakan adanya penurunan beban ekonomi sehingga mereka lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Akan tetapi, keterbatasan jumlah bantuan menyebabkan sebagian besar keluarga masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lain yang bersifat jangka panjang. Menurut Friedlander (2017), kesejahteraan sosial merupakan kondisi ketika individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak melalui dukungan sistem sosial yang memadai.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Pratiwi dan Suwondo (2022) yang menemukan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan PKH lebih banyak terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan peningkatan pendapatan keluarga. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa manfaat PKH lebih dominan dirasakan dalam aspek sosial dibandingkan aspek ekonomi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan telah memberikan manfaat yang cukup baik bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, kebermanfaatan program masih belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat karena bantuan yang diberikan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Oleh

sebab itu, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga keluarga penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan melalui usaha ekonomi yang berkelanjutan (Bappenas, 2020; Chambers, 2019).

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan tidak dapat diukur hanya berdasarkan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga harus dilihat dari ketercapaian tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa indikator ketepatan sasaran dan kebermanfaatan saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan. Apabila salah satu indikator belum terpenuhi secara optimal, maka efektivitas program secara keseluruhan juga belum dapat dikatakan maksimal. Menurut Nugroho (2021), efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam proses evaluasi Program Keluarga Harapan.

Permasalahan ketepatan sasaran yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan implikasi bahwa proses pemutakhiran data penerima bantuan perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Akurasi data menjadi dasar dalam menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan sehingga kesalahan dalam proses pendataan dapat memengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis mengharuskan pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala. Dengan demikian, bantuan sosial dapat disalurkan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Widodo (2021) yang menyatakan bahwa kualitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keakuratan informasi dan koordinasi antarlembaga pelaksana.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat Program Keluarga Harapan telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Temuan ini mengindikasikan bahwa program telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Akan tetapi, manfaat tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi karena sebagian besar bantuan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan secara mandiri. Menurut Edi Suharto (2021), keberhasilan perlindungan sosial akan lebih optimal apabila disertai dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.

Implikasi lain dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan, Dinas Sosial, dan masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Pemerintah desa memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam proses usulan maupun pembaruan data penerima manfaat. Pendamping PKH juga memiliki posisi strategis dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan kondisi keluarga penerima manfaat melalui kegiatan pendampingan secara berkala. Kolaborasi yang baik antaraktor akan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Menurut Grindle (2017),

keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pelaksana dalam membangun koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek kebermanfaatan, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek ketepatan sasaran. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap data penerima manfaat, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta integrasi program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan pada masa yang akan datang. Dengan adanya perbaikan tersebut, tujuan utama Program Keluarga Harapan sebagai instrumen perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan (Nugroho, 2021; Suharto, 2021).

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas menunjukkan hasil yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari aspek ketepatan sasaran, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima manfaat. Beberapa keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima PKH belum memperoleh bantuan, sementara sebagian keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik masih tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan masih perlu ditingkatkan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, dari aspek kebermanfaatan, Program Keluarga Harapan telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok rumah tangga sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga. Selain itu, kegiatan pendampingan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) turut meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan keluarga. Namun demikian, manfaat program belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga karena bantuan masih lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Dengan demikian, efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Paringgonan telah menunjukkan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Akan tetapi, peningkatan efektivitas program masih memerlukan perbaikan pada sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta integrasi Program Keluarga Harapan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memperkuat keberlanjutan manfaat program dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Contribution of Research

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian evaluasi kebijakan publik dengan menganalisis efektivitas PKH berdasarkan indikator ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program pada tingkat desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pendamping PKH dalam meningkatkan akurasi data

penerima manfaat, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Limitation of Research

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, penelitian hanya berfokus pada dua indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran dan kebermanfaatan program, sehingga belum mengkaji indikator lain seperti ketepatan waktu, efisiensi pelaksanaan, maupun dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam periode penelitian tertentu sehingga temuan yang dihasilkan menggambarkan kondisi pada saat penelitian dilakukan dan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh para informan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), serta menambahkan indikator evaluasi lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan.

Declaration of Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan dalam bentuk apa pun. Seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan artikel, dilakukan secara independen tanpa adanya pengaruh atau kepentingan dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, temuan dan kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini merupakan hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

References

- Adi, I. R. (2018). Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan. Rajawali Pers.
- Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. Tafsir al-Jalalain. Dar al-Ma'rifah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. BPS.
- Chambers, R. (2019). Rural development: Putting the last first. Routledge.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). Al-Qur'an dan terjemahnya. Syigma.

- Dianto, I. (2016). Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pasaman. Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, 10(1).
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Fikri, S., dkk. (2020). Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi zakat mal dan zakat profesi. Kencana.
- Friedlander, W. A. (2017). Introduction to social welfare. Prentice Hall.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial RI.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan.
- Maharani, C., dkk. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(3).
- Midgley, J. (2014). Social development: Theory and practice. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Natsir, N., dkk. (2025). Perlindungan sosial adaptif dan mekanisme penyaluran bantuan sosial: Studi kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo. Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research, 4(1).
- Nugroho, R. (2021). Public policy. Elex Media Komputindo.
- Nunung, A., & Sulastri, L. (2025). Implementasi kebijakan bantuan sosial. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 10(1).
- Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2022). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Putu Dewi, dkk. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(3).
- Ramdani, R., & Purnamasari, H. (2019). Evaluasi program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). International Journal of Demos, 1(1).
- Riyanto, W. H. (2025). Model kelembagaan daerah dalam penanganan kemiskinan.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). Analisis kebijakan publik. Alfabeta.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative.

Zakirin, & Arifin, J. (2022). Evaluasi kebijakan dilihat dari aspek dampak program. Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 5(1).